

**PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
(STUDI KASUS DESA MALIAYA KECAMATAN MALUNDA
KABUPATEN MAJENE)**

Munawir Arifin¹

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariyah Mandar
Email: munawirarif86@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine community participation in the implementation of development in Maliaya Village Malunda District, to find out the role of the village government in encouraging community participation in the implementation of development in Maliaya Village Malunda Subdistrict, and to find out the inhibiting factors and drivers that influence community participation in the implementation of development in Maliaya Village. This research was conducted in Maliaya Village, Malunda Subdistrict, Majene Regency, from January to February 2017. The method used in this study was to use a descriptive research form with qualitative data analysis. The results of the study show that the community is a factor supporting the development in the village is not good enough when viewed from the low participation of the community of Maliaya village.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Maliaya Kecamatan Malunda, untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Maliaya Kecamatan Malunda dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Maliaya. Penelitian ini dilakukan di Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene pada bulan Januari sampai Februari 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adalah faktor pendukung pembangunan di desa dinyatakan kurang baik bila dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat desa Maliaya.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan, Desa

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi, dan di setiap daerah/wilayah provinsi terdapat daerah/wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya di tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian desa dan kelurahan merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah kabupaten/kota.

Pemerintah desa seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa beserta perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa memiliki peran besar dalam mewujudkan pembangunan di suatu desa. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Misalnya pembangunan di bidang ekonomi, apabila pembangunan ekonokmi telah berjalan dengan baik maka pembangunan di bidang lain akan berjalan dengan baik (Siagian, 2000:4). Suatu skema baru otonomi daerah yang di dalamnya termuat semangat melibatkan masyarakat, dengan menekankan bahwa kualitas otonomi daerah akan ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat (Abe, 2005).

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah juga harus ada sebab masyarakat adalah pemilik kedaulatan dan masyarakat adalah subjek dalam pembangunan. Selain itu, program-program yang dirumuskan dan dilaksanakan secara partisipasi turut memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat dalam perencanaan yang menyangkut kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pemerintah desa. Dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri. Masyarakat sebagai subjek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini masyarakat perlu ikut dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya.

Peran langsung masyarakat desa sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan di desa itu sendiri dan terus diperkuat dan diperluas. Dengan demikian istilah partisipasi tidak sekedar menjadi retorika semata tetapi

diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Memang dalam kenyataan seringkali masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan, terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat kualitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi; kewenangan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kemudian selanjutnya dalam pasal 18 diatur mengenai kewenangan desa yang mencakup:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal yang menarik dan sejauh pengamatan penulis di Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene terlihat bahwa pemerintah desa (Kepala Desa) belum maksimal dalam melakukan fungsi motivator sebagai pemerintah desa. Desa ini terdiri dari beberapa dusun. Dan sejauh pengamatan penulis sebelum penelitian, berbagai program pembangunan telah tampak seperti pengecoran jalan di gang meskipun belum seluruhnya. Selain itu program pembangunan rumah atau bedah rumah bagi masyarakat desa yang kurang mampu. Program bedah rumah ini merupakan program yang memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah layak huni. Program bedah rumah dilakukan atas dasar partisipasi masyarakat Desa Maliaya dalam hal pembangunannya. Namun, dalam program ini tidak semua masyarakat ikut terlibat. Hanya sebagian masyarakat yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam program tersebut. Sebagian lagi acuh tak acuh. Tentu dalam hal ini dibutuhkan peranan dari pemerintah desa untuk memberikan dorongan agar masyarakat mau ikut berpartisipasi. Karena partisipasi dari masyarakat desa akan sangat berpengaruh dalam pembangunan desa itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dan analisis data kualitatif. Menurut Nawawi (2005: 64) bahwa bentuk deskriptif yaitu bentuk penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan Desa Maliaya kecamatan malunda

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI

Tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan Desa Maliaya bukan semata-mata dibebankan kepada pemerintah desa dan lembaga lain yang terlibat dalam pembangunan saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat desa dengan cara berpartisipasi dalam mensukseskan setiap program pembangunan.

1) Fungsi Instruktif

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana sesuatu itu dikerjakan agar dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan.

Oleh karena itu, wadah yang digunakan pemerintah Desa Maliaya dalam meningkatkan partisipasi haruslah sesuai dengan tujuan, isi dan maksud dari program pembangunan yang akan dilaksanakan. Adapun wadah partisipasi yang digunakan oleh pemerintah Desa Maliaya dalam menyampaikan setiap program pembangunan desa antara lain adalah melalui ide atau buah pikiran masyarakat. Ide masyarakat ini merupakan usulan yang disampaikan melalui musyawarah desa.

Namun melalui wadah tersebut, masyarakat desa Maliaya kurang kreatif dalam mengeluarkan ide atau pendapat. Masyarakat lebih cenderung menerima begitu saja keputusan yang dibuat oleh kepala desa. Hal ini terjadi karena masyarakat memberikan kepercayaan atau menyerahkan penuh kepada pemerintah desa masalah pembangunan yang akan dilaksanakan, walaupun pada akhirnya pembangunan desa yang dilakukan itu berjalan dengan apa adanya. Padahal pemerintah desa sangat membutuhkan ide-ide yang cemerlang dan kreatif dari masyarakat setempat mengenai proses pelaksanaan pembangunan maupun hasil dan pemeliharaan dari pembangunan.

2) Fungsi Konsultatif

Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masyarakat yang di nilai memiliki berbagai informasi dalam menciptakan keputusan.

Dari hasil penelitian bahwa pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi konsultatif sudah berusaha untuk berkonsultasi kepada aparat desa maupun masyarakat, namun dari hasil pembangunan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini di tandai dengan kualitas pengerjaan sehingga seperti pembangunan jalan yang ada tidak tahan lama dan hancur kembali. Padahal pemerintah sudah berkonsultasi kepada aparat desa maupun masyarakat sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ilyas US selaku ketua BPD di Desa Maliaya.

3) Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Pemerintah desa merupakan simbol formil kesatuan masyarakat desa. Sebagai badan kekuatan terendah, pemerintah desa dalam fungsi kepemimpinan memiliki berbagai fungsi untuk mengatur masyarakat desanya sendiri dan bertanggung jawab atas segala tugas yang diembannya. Mengingat desa merupakan tempat segala urusan dari segenap unsur pemerintah yang ada di atasnya maka seorang kepala desa berkewajiban menjalankan fungsi kepemimpinannya dalam masyarakat desa disamping harus menghadapi arus dan tuntutan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

4) Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan. Pelimpahan wewenang ini kepada bawahan harus diyakini yang merupakan pembantu pimpinan yang memiliki kesamaan prinsip dan aspirasi.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Maliaya fungsi pemerintah desa dalam memberikan wewenang kepada bawahan belum maksimal, dikarenakan dalam hal ini pemerintah desa (Kepala Desa) memberikan wewenang pada bawahan, ketika kepala desa berkenaan tidak hadir saja. Seharusnya kepala desa memberikan wewengangnya kepada bawahannya pada saat merencanakan pembangunan maupun dalam pelaksanaan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Bentuk Partisipasi

Adapun bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat desa Maliaya adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam bentuk uang atau benda
- b. Partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide
- c. Partisipasi dalam bentuk tenaga (gotong royong)

Keterlibatan Masyarakat dalam Penetapan Kebijakan Pembangunan

Keterlibatan dalam hal ini adalah apakah masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan program pembangunan. Untuk melaksanakan suatu pembangunan, partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa partisipasi dalam kegiatan perencanaan, partisipasi ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa. Namun, tidak mudah membangun partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha yang dapat membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Adapun hal yang dapat dilakukan adalah dengan pemberdayaan masyarakat oleh perangkat desa. Diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kesesuaian Pembangunan Desa dengan Kebutuhan Masyarakat

Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila desa tersebut memiliki sarana dan prasarana yang lengkap atau paling tidak pembangunan yang dilakukan dapat mendukung kemajuan masyarakat, baik dalam kemajuan di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Namun pembangunan yang dilakukan khususnya pembangunan desa tersebut tidak akan dapat tercapai apabila masyarakat dan pemerintah tidak saling bekerjasama untuk kemajuan desa.

Adapun pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah pembangunan rumah layak huni, dimana sudah lumayan banyak dan layak dihuni atau ditempati oleh masyarakat. Disamping pembangunan yang sudah dapat dinikmati oleh masyarakat, masih ada pembangunan yang telah dilakukan tetapi tidak dapat dinikmati, yaitu pembangunan sumur bor. Pembangunan sumur bor ini dirasakan oleh masyarakat tidak bermanfaat, dimana air yang dihasilkan dari pengeboran sumur ini tidak layak untuk dikonsumsi. Air yang dihasilkan adalah air keruh dan berbau, sehingga sangat tidak mungkin lagi masyarakat meminumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan yang dilakukan di desa Maliaya masih belum tepat sasaran dan kurang sesuai dengan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat, atau dapat dikatakan pembangunannya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat

Dengan lahirnya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan partisipasinya dalam pembangunan.

Dengan melibatkan adanya partisipasi, maka masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap pembangunan kemajuan daerahnya. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan adalah karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga pembangunan tersebut akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa tanggung jawab. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diliaht mulai dari perencanaan pembangunan, penyusunan program-program pembangunan sampai pada tahap pengawasannya. Dengan adanya partisipasi masyarakat ini, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah desa sudah dapat menjalankan perannya, yaitu melaksanakan peranan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam merencanakan suatu program pembangunan, masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam melakukan perencanaan pembangunan desa yang dilakukan, dimana masyarakat harus benar-benar terlibat di dalamnya.

HASIL PENELITIAN

Peran Pemerintah Desa adalah sebagai motivator dalam menyampaikan setiap program-program pembangunan kepada masyarakat baik perencanaan, pelaksanaan maupun komunikasi di dalam memelihara hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun indikator-indikator dari pemerintah desa dilihat dari fungsi kepemimpinan pemerintah desa yang akan diteliti adalah:

- 1) Fungsi Instruktif (menentukan perintah, mengerjakan perintah, bagaimana cara pengerjaan)

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis menanyakan kepada kepala desa Bapak Sofyan mengenai fungsi kepemimpinan dalam pemberian instruksi kepala desa sebagai administrator pembangunan. "Apakah ada instruksi Bapak dalam pelaksanaan pembangunan?" Beliau menjawab;

"Ada, kalau tidak ada instruksi dari saya bagaimana pelaksanaan pembangunan ini berjalan dengan baik. Saya selaku kepala desa sudah seharusnya melakukan instruksi kepada aparat desa maupun kepada masyarakat yang terlibat di dalamnya bagaimana pembangunan yang ada

di desa ini supaya berjalan dengan lancar dan harus menunggu instruksi dari saya.”

Dengan adanya penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kepala desa selaku administrator pembangunan dalam menjalankan fungsinya memang sudah melaksanakan fungsi instruktifnya.

2) Fungsi Konsultatif (cara menetapkan tujuan)

Untuk mengetahui apakah fungsi ini sudah dijalankan oleh pemerintah desa atau tidak, maka penulis menanyakan hal ini kepada salah satu perangkat desa dan salah satu masyarakat yang berfungsi untuk memperkuat pernyataan yang diberikan oleh pemerintah desa.

Penulis menanyakan kepada Bapak Drs. Ilyas US selaku ketua BPD mengenai bagaimana pemerintah desa menjalankan fungsi konsultatif ini dengan masyarakat desa Maliaya? Beliau memaparkan:

“Sejauh ini pemerintah desa sudah menjalankan fungsinya, dan salah satunya adalah fungsi konsultatif. Dalam setiap pambangunan yang dilakukan di desa pemerintah tidak bertindak tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat. Hal ini sangat penting dilakukan karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Di mana kita mengetahui bahwa pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan konsultasi dengan masyarakat, karena mereka sendirilah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan kami sebagai pemerintah bertugas untuk mewedahi aspirasi mereka”.

Dengan adanya penjelasan di atas memang ini yang diharapkan masyarakat, sesuai asas pembangunan dari masyarakat dan untuk masyarakat itu.

3) Fungsi Partisipasi (mengaktifkan orang-orang dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya)

Fungsi partisipasi merupakan fungsi dari pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam setiap pelaksanaan program pembangunan desa. Pemerintah desa harus berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.

Untuk melihat seberapa besar peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka penulis melakukan wawancara langsung kepada kepala desa Maliaya bapak Sofyan. Adapun yang penulis tanyakan adalah “Apakah Bapak sebagai kepala desa

ikut menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?”. Beliau menjelaskan :

“Iya ada, saya selaku kepala desa ikut dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memang seharusnya begitu. Bagaimana masyarakat bersemangat dalam memberikan partisipasinya kalau seandainya saya sendiri tidak ikut aktif dalam pembangunan, dan inilah salah satu peran saya dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Tidak hanya saya, aparat desa juga sangat berperan dalam pembangunan yang dilakukan di desa ini. Adapun perannya dapat dilihat kalau ada hal-hal yang baru yang berkaitan dengan masalah pembangunan dan perlu untuk dimusyawarahkan, maka aparat desa yang banyak berperan untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta yaitu dengan cara memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah pembangunan”.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa Maliaya sendiri dapat dikatakan bahwa memang pemerintah desa berperan dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa tersebut.

4) Fungsi Delegasi (melimpahkan wewenang sementara kepada bawahan)

Fungsi delegasi tidak hanya pencapaian efektifitas dan efisiensi yang diperoleh, tetapi dengan adanya delegasi tugas kepada masyarakat maka akan menciptakan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan maupun hasil pembangunan. Penulis mewawancarai aparat desa Bapak Irwanto selaku Sekretaris Desa berkenaan dengan fungsikepimpinan pemerintah desa sebagai administrator pembangunan. yaitu apakah pernah kepala desa melimpahkan wewenang kepada Bapak? Beliau menjawab:

“Pernah, apabila kepala desa berkenaan tidak hadir dalam musyawarah desa dikarenakan adanya kepentingan lain. Hal ini tentunya harus ada koordinasi dari kepala desa itu sendiri baik dalam proses keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan”.

Dari penjelasan Bapak Irwanto diatas maka kerjasama antara pemerintah desa (KepalaDesa) dengan aparat desa sudah terjalin baik. Pelimpahan wewenang tersebut bukan berartikepada desa melepaskan tanggung jawabnya sebagai administrator pembangunan. Hal ini harus sesuai dengan tugas kepala desa sebagai administrator dalam pelaksanaanpembangunan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Untuk lebih mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka penulis melakukan wawancara dengan para informan

yang ada di Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene yang dianggap kompeten mengetahui tentang partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. Adapun indikator-indikator yang akan diteliti dari partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Wujud atau Dimensi Partisipasi

Untuk melihat hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Maliaya (Bapak Sofyan) mengenai partisipasi masyarakat beliau menjelaskan:

“Masyarakat Desa Maliaya tergolong sangat berpartisipasi, dalam pembangunan desa ini, khususnya dalam pembangunan desa, dimana masyarakat banyak yang ikut terlibat dalam mengelola atau mengerjakan proyek pembangunan. Dan sebagai Kepala Desa saya merasa berkewajiban ikut serta dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat desa, memang seharusnya begitu. Bagaimana mungkin masyarakat ikut bersemangat dalam berpartisipasi kalau seandainya saya sendiri tidak ikut aktif dalam pembangunan desa ini. Tidak hanya masyarakat, aparat desa juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan di desa ini. Jika ada hal baru dan perlu dimusyawarahkan, di sinilah peranan aparat desa yang banyak. Contohnya kepala urusan pembangunan (Kaur Pembangunan) yang banyak merencanakan apa yang akan dilakukan dalam hal pembangunan infrastruktur desa”.

2) Keterlibatan Masyarakat dalam Penetapan Kebijakan Pembangunan Daerah

Untuk melihat kenyataan yang terjadi dilapangan, yaitu apakah masyarakat benar-benar dilibatkan dalam penetapan kebijakan pembangunan desa yang dilakukan. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan salah satu anggota masyarakat. Adapun yang penulis wawancarai adalah Bapak Rahmat, dengan menanyakan “Apakah masyarakat juga turut di libatkan dalam penetapan program pembangunan yang dilakukan di desa Maliaya?” Beliau menjawab:

“Dalam penetapan program pembangunan masyarakat selalu dilibatkan, namun kendalanya ada pada masyarakat itu sendiri. Seringkali hanya sedikit masyarakat yang terlibat dalam penetapan kebijakan pembangunan. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari untuk mencari nafkah. Ya sebagai masukan buat pemerintah daerah yang terlibat dalam pembangunan desa. Harapannya mengadakan rapat tidak pada waktu masyarakat lagi beraktifitas atau mengerjakan pekerjaan sehari-hari, karena hal ini sangat mempengaruhi tingkat kehadiran masyarakat dalam proses penetapan dan pelaksanaan program

pembangunan desa. Padahal kita ketahui bahwa kehadiran masyarakat sangat penting, karena hal ini mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di desa Maliaya“.

3) Kesesuaian Pembangunan Desa dengan Kebutuhan Masyarakat

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan di desa Maliaya serta keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan perannya meningkatkan partisipasi masyarakat, penulis perlu melakukan wawancara kepada masyarakat untuk melihat sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan di desa Maliaya.

Penulis menanyakan hal tersebut kepada salah satu tokoh masyarakat, yaitu Bapak Sumarsono. “Apakah pelaksanaan pembangunan di desa Maliaya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa?” Bapak Sarkawi menjelaskan:

“Pelaksanaan pembangunan di desa Maliaya sudah ada yang sesuai dan masih ada yang belum sesuai, bahkan kadang pembangunan yang dilakukan ada yang tidak berdaya guna sama sekali. Misalnya pembangunan sumur bor yang telah dilakukan, sampai sekarang banyak yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena airnya kotor dan berbau. Selain itu mesin yang digunakan sering rusak. Kalau pembangunan rumah layak huni sudah agak sesuai, namun bobot dan jumlahnya masih kurang”.

4) Kerjasama Antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat

Untuk melihat kebenarannya dilapangan maka penulis kembali melakukan wawancara dengan masyarakat desa Maliaya, yaitu dengan Ibu Syamsiah. “Apakah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan di desa Maliaya?” Ibu tersebut menjelaskan:

“Betul, masyarakat dilibatkan dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan pembangunan yang telah dilakukan. Tapi, mengenai dana-dana untuk pembangunan kami sebagai masyarakat tidak tahu, yang kami ketahui hanyalah mengenai pembangunannya saja. Misalnya dalam pembangunan atau perbaikan jalan dan jembatan, saluran air bersih dan lain-lain”.

Selain kepada masyarakat, penulis menanyakan hal yang senada kepada Ketua BPD, yaitu Bapak Drs. Ilyas US, Beliau menjelaskan:

“Dalam rapat musyawarah pembangunan desa masyarakat selalu dilibatkan. Apalagi disini setiap tahun ada kebijakan dari pemerintah daerah (Bupati) untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan. Hal ini dinamakan dengan Sistem jemput bola/musrenbang.

Masyarakat yang memberikan secara langsung ide-ide atau pemikiran mereka”.

KESIMPULAN

Sebagai hasil akhir penelitian tentang Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Maliaya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, dapat berbentuk uang atau benda, partisipasi masyarakat dalam bentuk ide dan pikiran serta partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga (gotong-royong) berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan masih rendah. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat status sosial ekonomi rata-rata masyarakat desa, rendahnya tingkat pendidikan rata-rata masyarakat desa, serta dikarenakan kesibukan masyarakat desa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi, kesimpulannya masyarakat sebagai faktor pendukung pembangunan di desa dinyatakan kurang baik bila dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat desa Maliaya.
2. Peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene berdasarkan hasil penelitian belum maksimal di karenakan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat maupun aparat desa sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah desa belum mencapai sasaran dan tujuan pembangunan. Memang pemerintah Desa Maliaya telah melakukan upaya dan perannya, seperti mengajak masyarakat untuk ikut dalam berbagai kegiatan desa dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan isi, tujuan, dan maksud dari setiap program-program pembangunan yang ingin dilaksanakan. Namun kurangnya sosialisasi merupakan salah satu faktor sehingga masyarakat yang berpartisipasi hanya segelintir saja. Sesuai hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, masyarakat desa Maliaya belum merasakan peran pemerintah desa dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat dan adanya pembangunan yang tidak tepat sasaran sehingga tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.
3. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Maliaya dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Hal-hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat adalah masih rendahnya tingkat status sosial ekonomi rata-rata masyarakat desa, rendahnya tingkat pendidikan rata-rata masyarakat desa, serta dikarenakan kesibukan

masyarakat desa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yang ada di Desa.

SARAN DAN REKOMENDASI

Setelah melihat kesimpulan di atas, ada hal-hal yang perlu penulis sarankan sebagaimasukan untuk lebih meningkatkan lagi kualitas maupun kuantitas palaksanaanpembangunan di Desa Maliaya, antara lain :

1. Agar pemerintah desa Maliaya sebagai penggerak dan motivator dalam pembangunandesanya lebih baik, maka pemerintah desa Maliaya hendaknya mencari alternatif-alternatiflain yang dapat digunakan sebagai wadah atau saluran untuk menyampaikan informasidari setiap program pembangunan, pemerintah desa Maliaya harus lagi meningkatkanintensitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan masyarakat.
2. Pemerintah desa hendaknya mampu memotivasi masyarakat dengan menyadarkanmasyarakat bahwa setiap program-program pembangunan yang dilaksanakan akan dapatmeningkatkan status sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian maka akan sangatmendukung keberhasilan program-program pembangunan desa yang dilakukan.
3. Pemerintah desa harus tegas dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya supayatujuan daripada pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lancar baik dalammengintruksikan kepada aparat desa maupun masyarakat apa yang akan di rencanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukmianto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Fahrudin, Adi. *Pemberdayaan, Partisipasi, Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Humaniora: Bandung.
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Hasbullah. 2010. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Nasution, S. 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Rochaety Ety,dkk. 2005. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Cetakan Pertama. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju: Bandung.
- Sindhunata. 2000. *Menggagas Paradigama Baru Pendidikan “demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Kansius: Yogyakarta.
- Soetriono dan SRDM Rita Hanafie. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penulisan*. C.V Andi Offset: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Alfabeta: Bandung.
- Suharto,Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat “Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial”*. Refika Aditama: Bandung.
- Suhendra K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta: Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. PT Refika Aditama : Bandung.
- Tilaar, A, R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Cetakan Pertama. PT Rineka Cipta: Jakarta
- Tim Prima Pena. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. Gitamedia Pres: Jakarta.
- Walgito, Bimo. 1999. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. C.V Andi Offset: Yogyakarta.